



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA I

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKHSANUL KHAQ
2. Jabatan : AUDITOR UTAMA
3. NHK : 63005

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 960.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 193.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, ERTIGA SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOTOR, HONDA ADV150 CBS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOTOR, HONDA ADV150 CBS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.586.463.691

F. HARTA LAINNYA Rp. 70.000.000

Sub Total Rp. 2.809.463.691

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.809.463.691



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.